

BAB 1

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi yang mana demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan yang didalamnya berisitentang semua warga negaramemiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang nantinya dapat mengubah hidup mereka.

Istilah dari demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demokratia*. Istilah ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi sama halnya dengan kekuasaan pada rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Dalam sistem Nrgara yang menganut demokrasi terdapat sistem pemilihan secara langsung yang di dalamnya terdapat sistem pemilu. Pengertian pemilu menurut Ali Moertopo pemilu adalah suatu sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai azas yang termasuk didalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan menurut Suryo Untoro pemilu memiliki arti sebagai suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat..

Dalam pemilu harus terdapat komunikasi politik antara pemilih dengan kontestan pemilu. Maka dengan adanya komunikasi politik dapat di ketahui sejauh mana partisipasi pemilih khususnya pemilih milenial. Pengertian komunikasi politik menurut Miriam S. Budiardjo ialah komunikasi politik sebagai salah satu fungsi dari partai politik, yang menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Gabriel Almond berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat 6 fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan.

Saat ini Indonesia sedang berada didalam sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yaitu sedang berada pada puncak masa Bonus demografi, banyaknya

penduduk usia produktif dibanding penduduk berusia non-produktif. Penduduk usia yang produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah populasi warga negara Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 266,91 juta jiwa. Proporsi jumlah penduduk usia produktif yakni(usia 15-65 tahun) sebanyak 183,36 juta jiwa atau 68,7% total populasi. Adapun usia penduduk tidak produktif yakni(usia di atas 65 tahun) sangat rendah, sekitar 6,51% populasi. Sementara itu, persentase dari generasi milenial (usia 20-35 tahun) mencapai 25% .Diperkirakan, bonus demografi yang dialami Indonesia ini akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2036 nanti. Dalam artian peluang Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi tinggal 17 Tahun Lagi. Sementara itu, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah menjadi 19 persen hingga 2045, bertepatan saat kemerdekaan Indonesia memasuki angka 100 tahun.

Sedangkan pada pemilihan milenial termasuk dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 yang berisi tentang warga Indonesia yang pada hari pemilihan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 Tahun dan atau lebih dari 17 Tahun atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih. Berdasarkan data pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilihan milenial saat ini mencapai 70 juta–80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Populasi kelompok milenial di Indonesia menyusun sekitar 34,5 hingga 50 persen dari total penduduk, dengan rentang usia 17-38 tahun. Angka tersebut menunjukkan ukuran yang sangat signifikan, sehingga pemilihan milenial menjadi kelompok sasaran yang jelas untuk menang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 lalu oleh Pusat Penelitian Alvara Indonesia menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan milenial Amerika. Milenial Indonesia memanfaatkan sumber digital untuk mengetahui dan memahami politik dengan mengandalkan media sosial Facebook, YouTube, Instagram, LINE, dan juga WhatsApp untuk membentuk persepsi mereka tentang politik.

Posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada tahun politik seperti saat ini. Mereka merupakan bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Partisipasi politik generasi milenial tentu sangat substansial karena dari persentase jumlah pemilih, generasi milenial menyumbang suara cukup banyak dalam keberlangsungan pemilu. Dengan peran generasi milenial sebagai

pemilih yang memiliki sumbangsih terhadap suara dari hasil pemilihan yang cukup besar, maka posisi generasi milenial menjadi sangat strategis untuk dijadikan objek sasaran pemungutan suara. Beberapa tahun belakangan ini terlihat semakin banyak politisi yang menyadari pentingnya peran media sosial sebagai cara untuk memperoleh kemenangan pada pemilu.

Dilihat dari sisi usia, kemungkinan sebagian besar di antara mereka adalah pengguna media sosial. Mereka diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan menjadi incaran para partai politik dan politisi untuk diraih suaranya. Jika pada masa lalu bentuk partisipasi politik lebih bersifat konvensional dan cenderung membutuhkan waktu lama, misalnya pada aksi turun ke jalan atau biasa disebut dengan istilah demo dalam melakukan demonstrasi, tindakan politik (political actions) generasi muda dewasa ini dipandang sebagai sesuatu yang "baru" karena tidak pernah terjadi pada masa satu dekade lalu. Contohnya ialah partisipasi politik melalui internet dan media sosial. Tindakan politik generasi muda saat ini memiliki sifat cenderung lebih individual, bersifat spontan, berdasarkan pada isu tertentu dan kurang terkait dengan perbedaan sosial. Hal ini terjadi akibat pengaruh globalisasi dan individualisme serta konsumsi dan kompetisi yang ada.

Adanya peran opini publik dalam berpolitik yang tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat politik. Opini publik bisa dianggap sebagai suatu pendapat, kepercayaan atau keyakinan pada masyarakat dalam menghadapi suatu issue. Kekuatan dari opini publik memang sangat luar biasa. Karena jika opini publik sudah terbentuk, maka bisa cukup mempengaruhi dalam proses politik yang ada. Contoh yang dapat kita lihat secara nyata dalam keseharian adalah bagaimana ketika suatu kelompok membangun opini publik dan disetujui oleh mayoritas, maka bisa mengubah cara atau alur pemerintahan yang ada. Oleh karena itu opini publik memang bisa memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan berpolitik. Opini publik dalam konteks komunikasi, merupakan hasil dari proses penyampaian pesan yang secara kolektif (publik) direspon karena perhatian yang sama terhadap isi pesan (issue) yang disampaikan. Opini publik merupakan hasil tindakan komunikasi yang berjalan secara linier, karena saluran yang digunakan adalah komunikasi massa/media massa. Tanpa media (massa) kecil kemungkinan terjadinya opini publik. Respon atau efek yang wujudnya opini publik tersebut merupakan konfirmasi atau penegasan (setuju/tidak setuju, suka/tidak suka dst) terhadap isu yang disampaikan oleh masyarakat. Munculnya

opini publik umumnya disebabkan oleh sebuah kebijakan publik atau kepentingan umum di sebuah pemerintahan “demokratis”. Frazier Moore “2004” Menjelaskan Opini Public adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama diantara para anggota sebuah kelompok atau public, mengenai suatu masalah controversial yang menyangkut kepentingan umum.

Penelitian seperti ini memang harus dilakukan pada sebuah daerah dengan jumlah DPT terbanyak agar dapat diperoleh hasil penelitian dengan maksimal. Maka dari itu, pada penelitian kali ini dilakukan pada Kecamatan Semanding karena diketahui jumlah DPT terbanyak di Kabupaten Tuban adalah Kecamatan Semanding. Dengan jumlah penduduk mencapai 119.727 jiwa, yang terbagi dari 59.402 laki-laki dan 60.325 perempuan. Pada pemilihan Gubernur lalu jumlah DPT Kecamatan Semanding mencapai angka 82.751 yang terdiri atas 40.254 pemilih atau sama dengan 53.82% dari perolehan pemilih laki-laki dan 42.560 pemilih atau setara dengan 64.29% dari pemilih perempuan. Jumlah tersebut diperoleh dari total keseluruhan jumlah suara pada Kecamatan Semanding yang terbagi atas 2 Kelurahan dan 15 Desa.

Ketua KPUD Tuban Kasmuri mengatakan bahwa Generasi milenial merupakan generasi yang memilikipotensi menjadi pemilih cerdas. Karena dilihat pada usia, pendidikan dan kesempatan memperoleh info kepemiluan sangat tinggi. Sehingga dari Pemilu diharapkan akan menghasilkan pilihan yg berkualitas. Kasmuri menjelaskan, di tahun 2019 kabupaten Tuban memiliki 946.748 Data Pemilih Tetap (DPT) dan di dalam data tersebut hak pilih generasi Milenial mencapai 38%. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pilkada Kabupaten Tuban telah didominasi oleh dua dinasti, yaitu dari team Dra. Hj Haeny Relawati Rini Widyastuti.M.Si dan juga dari team H.Fathul Huda. Keduanya memang sudah berhasil memenangkan kursi Bupati selama dua periode, jadi tidak heran jika hingga saat ini keduanya masih turut andil dalam pilkada. Masing-masing dari keduanya saat ini telah menjagokan putranya. Membludaknya angka milenial membuat trobosan baru bagi para politikus dengan menggandeng calon yang juga termasuk dalam generasi milenial. Dalam memahami karakteristik generasi milenial di Tuban, mereka punya cara berpikir tersendiri. Cara berpikir mereka jauh sekali dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi, dengan generasi orang tuanya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas PGRI Ronggolawe Satya Irawatiningrum mengatakan “para generasi milenial itu lebih akrab dengan dunia maya. Khususnya penggunaan media

sosial. Generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri. Mereka adalah anak kandung internet” beliau mengungkapkan, ada beberapa ciri dari generasi milenial. Secara umum, ini adalah generasi yang melek terhadap informasi. Sehingga, sadar betul mana informasi yang tepat untuk dirinya dan tidak untuk dirinya. Beliau melanjutkan, meski anak-anak milenial cukup tahu tentang informasi bisa saja mereka cenderung apatis. Maksudnya, mereka bisa enggan turut memilih karena memang dia lebih suka dengan dunia sendiri dan memang ini yang dikhawatirkan.

Komisioner KPU Tuban, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Yayuk Dwi Agus, menyampaikan, berdasarkan data rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu di Kabupaten Tuban, tercatat total jumlah pemilih yang menggunakan hak suara pada pemilu sebelumnya mencapai 769.473 pemilih atau 81,19% dari total 946.748 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Tuban. Perhitungan tersebut jauh di atas target nasional atau KPU RI yang hanya sebesar 77,5%. Sedangkan masyarakat Tuban yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 177.275 orang, yang disebabkan karena berbagai faktor. Dijelaskan, tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Tuban pada tahun ini tidak lepas dari peran semua pihak. Partisipasi pemilih ini menunjukkan kepedulian masyarakat Tuban terhadap pemilu 2019 semakin baik. Itu dibuktikan dengan masyarakat antusias datang ke masing-masing TPS untuk menggunakan hak pilihnya

Membahas mengenai milenial pada pilkada yang akan datang di Kabupaten Tuban, mantan Bupati Tuban dua periode yang ke-51 Dra. Hj Haeny Relawati Rini Widyastuti.M.Si memberikan dukungan penuhnya untuk Aditya Harlinda yang merupakan anak nomor tiga dari pernikahannya dengan Alm. Ali Hasan. Linda merupakan kader dari partai Golkar yang usianya baru memasuki 27 Tahun. Ia juga merupakan anggota DPRD Jawa Timur. Sementara itu tidak ketinggalan dengan calon tersebut diatas, H.Fathul Huda merupakan Bupati ke-52 yang juga berhasil menjabat selama dua periode pada tahun 2011 hingga sekarang. Beliau memberikan dukungan penuhnya kepada Fredy Ardliyan Syah, 34 Tahun yang juga termasuk dalam generasi milenial. Fredy merupakan putra dari pernikahan H.Fathul Huda dengan Qodiriyah. Diketahui Fredy memang sedang berjuang untuk melanjutkan perjalanan sang ayah dalam menjabat sebagai Bupati. Saat ini dari kedua dinasti tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan masyarakat, khususnya generasi milenial yang saat ini memang memiliki potensi suara

terbanyak. Pendukung dari kedua kandidat ini sejak adanya pengumuman bahwa kedua nama pasangan telah mengikuti pilkada, mereka secara agresif memulai kampanye terutama di media sosial. Pemilih dari kelompok usia generasi milenial menjadi target potensial karena jumlah populasi mereka yang signifikan dan merebaknya penggunaan media sosial mereka.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan prosedur penyebaran kuisioner kepada pemilih milenial yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Yakni generasi milenial yang sudah memasuki usia 17 hingga 35 tahun dan tersebar pada 20 Desa atau Kecamatan yang berada didalam wilayah Kecamatan Semanding. Waktu pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2020 hingga Desember Tahun 2020

1.6 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana opini pemilih milenial terhadap Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020?

1.7 Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini pemilih milenial terhadap Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020

1.8 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
2. Manfaat bagi masyarakat
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang apa saja opini yang dimiliki oleh pemilih milenial pada Pilkada Kabupaten Tuban periode 2020-2025.